RETAKNYA SAYAP GARUDA

KORUPSI, KRISIS KEPERCAYAAN,
DAN PARADOKS
PEMBANGUNAN INDONESIA

Retaknya Sayap Garuda

lynk.id/digterra

Korupsi, Krisis Kepercayaan, dan Paradoks Pembangunan Indonesia

PROLOG
Suara dari Dua Sisi Jembatan Tol

Deru halus itu nyaris tak terasa. Hanya getaran lembut yang merambat sesaat ketika sedan Eropanya melintasi sambungan baja di atas jembatan tol baru yang membentang gagah, membelah hamparan sawah yang mulai menyerah pada patok-patok beton. Di dalam kabin yang sejuk oleh penyejuk udara, terisolasi dari terik Juni 2025 yang memanggang aspal di luar, Budi tersenyum tipis.

Layar sentuh di dasbornya yang senyap baru saja menampilkan notifikasi email dari prinsipal di Jepang. Subjeknya singkat dan tegas: "Q2 *Production Target Exceeded. Efficiency Increased by 15%.*" Lima belas persen. Angka itu terasa manis. Angka itu adalah validasi dari kerja kerasnya selama berbulan-bulan mengimplementasikan sistem otomatisasi baru di lantai pabrik. Angka itu berarti bonus, promosi, dan pengakuan. Di luar jendela kacanya, Indonesia terasa benar-benar melaju kencang. Dan ia, Budi, berada di kursi pengemudi.

Seratus meter di bawah kemewahan itu, di mana pilar-pilar beton jembatan menancap ke bumi, udara terasa lebih berat. Aroma kopi robusta yang pekat berbaur dengan asap rokok kretek dan debu jalanan yang beterbangan setiap kali sebuah truk tua melintas. Di sebuah warung semi-permanen, Ahmad mengaduk kopi hitamnya perlahan, tanpa gula. Tatapannya kosong, mengarah pada gelas yang sudah mulai retak.

"Lima ratus orang," desisnya pelan, lebih kepada dirinya sendiri daripada kepada tiga temannya yang duduk diam di bangku panjang. Suaranya serak. "Bulan lalu, masih lima ratus orang di lini perakitan. Sekarang… habis."

lynk.id/digiterra

Seorang temannya menyahut, “Diganti lima puluh lengan robot dari Jerman, Mat. Aku lihat sendiri waktu ambil pesangon.”

Tak ada yang menyahut lagi. Hanya suara seruputan kopi yang terdengar lebih keras di tengah senyap, seolah menjadi satu-satunya jawaban yang mereka punya. Dari atas, gema deru mobil di atas jembatan terdengar seperti guruh dari dunia lain. Dunia yang menjanjikan kemajuan, namun tak menyisakan tempat bagi mereka.

Dua dunia ini—dunia Budi dan dunia Ahmad—tidak terpisah ribuan kilometer. Mereka hanya terpisah oleh seratus meter beton dan aspal, namun hidup dalam realitas yang sama sekali berbeda. Keduanya adalah wajah Indonesia hari ini. Yang satu adalah wajah yang ditampilkan di forum-forum investasi global: narasi di atas kertas yang dipenuhi angka-angka pertumbuhan, efisiensi, dan modernisasi. Yang satu lagi adalah wajah yang jarang terlihat di laporan tahunan perusahaan: narasi di atas tanah yang dipenuhi suara-suara lirih, kecemasan, dan pertanyaan tentang hari esok.

Inilah Indonesia hari ini: seorang Raksasa yang melangkah gagah, namun bertumpu pada Kaki Kaca yang rapuh dan retak. Sebuah bangsa yang membangun jalan tol ke masa depan, namun di saat yang sama meninggalkan sebagian penumpangnya di pinggir jalan.

Buku ini adalah sebuah perjalanan untuk menelisik retak-retak itu. Ia akan membawa Anda melintasi dua sisi jembatan tol, masuk ke dalam ruang rapat berpendingin udara dan lantai pabrik yang panas, menyusuri sungai yang menghitam karena limbah dan lobi-lobi kekuasaan yang keruh, untuk mendengar kedua narasi yang saling bertentangan tersebut.

Ini bukan upaya untuk menghakimi, melainkan untuk memahami. Memahami arsitektur dari sebuah paradoks yang telah kita bangun bersama.

Karena itu, buku ini adalah sebuah undangan untuk mencari jawaban atas satu pertanyaan fundamental: **Untuk siapa sebenarnya sang**

lynkid/distera

raksasa ini dibangun, dan berapa harga yang harus kita bayar untuk setiap langkahnya?

lynk.id/digiterra

Daftar Isi

PROLOG
Suara dari Dua Sisi Jembatan Tol....2
Daftar Isi....5

BAGIAN I:
JANJI RAKSASA YANG TERBANGUN....7
Bab 1
Visi Indonesia Emas 2045:
Peta Biru di Atas Meja Elite....8
Bab 2
Angka-Angka yang Berbicara:
Data Makro sebagai Legitimasi....11
Bab 3
Episentrum Digital ASEAN:
Narasi Startup dan Ekonomi Pengetahuan....14

BAGIAN II:
RETAK DI KAKI KACA....17
Bab 4
Efisiensi sebagai Senjata Makan Tuan:
Senyapnya Lantai Pabrik....18
Bab 5
Dapur yang Tak Lagi Mengepul:
Angka vs. Realita di Meja Makan....21
Bab 6
Tanah Kami, Proyek Kalian:
Peta Konflik di Balik Peta Pembangunan....24
Bab 7
Sungai yang Sekarat, Udara yang Meracuni:
Biaya Ekologis yang Tak Tercatat....27

BAGIAN III:
MENDIAGNOSIS PARADOKS....30
Bab 8

lynk.id/digiterra

Arsitektur Ketidakadilan:
Oligarki dan Liga Korupsi Indonesia..... 31
Bab 9
Krisis Kepercayaan:
Erosi Modal Sosial dari Dalam dan Luar.....34
Bab 10
Jebakan Keterampilan:
Pendidikan yang Tertinggal dari Laju Mesin.....37
Bab 11
Eksternalitas:
Biaya Siluman yang Dibayar Rakyat..... 40

BAGIAN IV:
MEMBANGUN KEMBALI SANG RAKSASA..... 43
Bab 12
Kontrak Sosial Baru:
Membangun di Atas Fondasi Kepercayaan..... 44
Bab 13
Demokrasi Substantif:
Dari Partisipasi Semu ke Kedaulatan Rakyat..... 47
Bab 14
Transisi yang Berkeadilan:
Ekonomi Hijau yang Tidak Meninggalkan Siapapun.....50
Epilog
Optimisme Bertindak, Bukan Optimisme Menunggu.....53

lynk.id/digiterra

BAGIAN I:
JANJI RAKSASA YANG TERBANGUN

Sebelum kita menelisik keretakan-keretakannya, kita harus terlebih dahulu memahami kemegahan sang raksasa itu sendiri. Bagian ini adalah sebuah upaya untuk membedah dan menyajikan visi pembangunan Indonesia sebagaimana yang dicita-citakan, dirancang, dan dikomunikasikan oleh para arsiteknya—pemerintah, teknokrat, dan para kapten industri. Dengan gaya dokumenter yang terukur, kita akan menempatkan diri sebagai pendengar yang objektif, menyelami peta biru, data, dan narasi yang menjadi bahan bakar mesin optimisme nasional.

Kita akan mulai dengan membedah visi besar "Indonesia Emas 2045", lengkap dengan mantra saktinya: hilirisasi, dan simbol utopisnya: IKN. Kemudian, kita akan memeriksa pilar-pilar kuantitatif yang menjadi legitimasinya, dari angka pertumbuhan PDB, data investasi, hingga surplus neraca perdagangan. Akhirnya, kita akan menjelajahi narasi yang lebih dinamis tentang revolusi digital yang menjadikan Indonesia sebagai episentrum baru di Asia Tenggara.

Ini adalah janji yang diletakkan di atas meja, sebuah potret dari masa depan yang ingin kita raih bersama. Mari kita selami narasi kemajuan ini, bab demi bab, untuk memahami sepenuhnya argumen dan daya tariknya.

---

lynk.id/digiterra

Bab 1
Visi Indonesia Emas 2045:
Peta Biru di Atas Meja Elite

Di setiap persimpangan sejarah sebuah bangsa, selalu ada momen ketika sebuah peta baru digambar. Sebuah peta yang tidak hanya menunjukkan wilayah, tetapi juga arah, ambisi, dan takdir yang dicita-citakan. Bagi Indonesia di dekade ketiga abad ke-21, peta itu bernama "Visi Indonesia Emas 2045". Ini bukanlah sekadar slogan yang lahir dalam semalam, melainkan kulminasi dari sebuah keyakinan yang telah lama berakar di benak para teknokrat dan elite politik: bahwa Indonesia tidak ditakdirkan untuk selamanya menjadi negara berkembang.

Fondasi awalnya telah diletakkan beberapa tahun sebelumnya melalui sebuah cetak biru yang lebih teknis, "Making Indonesia 4.0". Dokumen itu adalah respons lugas terhadap disrupsi global, sebuah upaya untuk memastikan industri manufaktur nasional tidak tertinggal oleh derap langkah otomatisasi dan kecerdasan buatan. Lima sektor—makanan dan minuman, tekstil dan busana, otomotif, elektronik, dan kimia—ditetapkan sebagai ujung tombak. Namun, seiring berjalannya waktu, visi itu dirasa perlu disempurnakan, diperluas melampaui sekadar lantai pabrik.

Maka lahirlah Visi Indonesia Emas 2045, sebuah narasi yang jauh lebih agung. Dalam dokumen-dokumen resmi setebal ratusan halaman dan pidato-pidato kenegaraan yang berapi-api, tujuannya terpampang jelas: pada ulang tahunnya yang keseratus, Indonesia harus telah menjadi negara maju, masuk dalam jajaran lima besar kekuatan ekonomi dunia, dengan pendapatan per kapita yang setara dengan negara-negara OECD. Peta ini

lynk.id/nagtera

ditopang oleh pilar-pilar raksasa: sumber daya manusia yang unggul, pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, serta pemerataan yang inklusif.

Di jantung mesin ekonomi yang dirancang untuk mewujudkan visi tersebut, ada satu kata kunci yang terus diulang hingga menjadi semacam mantra sakti: **hilirisasi**.

Gagasan di baliknya terdengar begitu logis dan tak terbantahkan. Selama berpuluh-puluh tahun, Indonesia telah menjadi pemasok bahan mentah bagi dunia. Menggali kekayaan bumi, lalu mengirimkannya dalam bentuk bongkahan-bongkahan tanah atau bijih mentah ke negara lain untuk diolah, yang kemudian menjualnya kembali ke Indonesia dalam bentuk produk jadi dengan harga berlipat-lipat. Era itu, menurut para arsitek visi ini, harus diakhiri. Hilirisasi adalah deklarasi kemandirian ekonomi.

Bukan lagi sekadar menjual bijih nikel mentah dengan harga beberapa puluh dolar per ton, melainkan menjual katoda baterai yang bernilai ribuan dolar. Bukan lagi mengekspor bauksit berwarna merah tanah, melainkan aluminium batangan yang berkilau. Tujuannya adalah untuk memanjat rantai nilai global secara paksa. Dengan menguasai teknologi pengolahan di dalam negeri, Indonesia tidak hanya akan menikmati nilai tambah yang masif, tetapi juga memegang kendali atas komoditas yang paling dicari di era ekonomi hijau: jantung dari mobil listrik masa depan. Di atas kertas, argumen ini tampak sempurna, sebuah jalan tol menuju kemakmuran.

Namun, visi besar tidak cukup hanya dengan mesin ekonomi. Ia butuh sebuah panggung, sebuah simbol yang bisa dilihat dan dirasakan. Simbol itu kini sedang mengambil wujudnya di jantung Kalimantan, bernama Ibu Kota Nusantara (IKN).

Bagi para perancangnya, IKN adalah jawaban atas berbagai persoalan historis bangsa. Ia adalah antitesis dari Jakarta yang padat dan terbebani. Ia adalah koreksi atas ketimpangan pembangunan yang selama ini "Jawasentris". Lebih dari itu, ia adalah sebuah kanvas kosong tempat utopia

lynk.id/nisterna

Indonesia modern akan dilukis. Sebuah kota yang dirancang dari nol, di mana drone pengantar barang melesat senyap di antara gedung-gedung hijau bersertifikasi platinum, di mana sistem transportasi publik elektrik menjadi urat nadi, dan di mana pusat pemerintahan yang digital dan efisien menyatu dengan hutan hujan tropis yang dilestarikan. IKN adalah janji sebuah permulaan baru.

Pada akhirnya, semua cetak biru, mantra ekonomi, dan proyek raksasa ini bermuara pada satu janji pamungkas: kue pertumbuhan ekonomi yang lebih besar dan terbagi lebih merata. Proyeksi resmi dari Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) menjabarkan angka-angka yang menjanjikan. Belasan juta lapangan kerja baru akan tercipta, tidak hanya di lokasi proyek utama, tetapi juga di sektor-sektor pendukungnya. Roda ekonomi daerah akan berputar lebih kencang, memicu pertumbuhan sentra-sentra ekonomi baru di luar Jawa. PDB per kapita ditargetkan meroket, secara bertahap mengangkat puluhan juta orang dari garis kemiskinan dan melahirkan kelas menengah baru yang lebih kuat.

Di atas kertas, peta menuju kemakmuran telah terbentang. Visi itu jelas, dan mesinnya telah dinyalakan. Inilah janji yang ditawarkan oleh sang raksasa yang tengah terbangun.

lynk.id/digiterra

Bab 2
Angka-Angka yang Berbicara:
Data Makro sebagai Legitimasi

Sebuah visi, betapapun agungnya, akan tetap menjadi angan-angan tanpa adanya metrik keberhasilan yang terukur. Dalam bahasa universal ekonomi dan pemerintahan, metrik itu adalah angka. Data adalah kebenaran objektif, rapor yang tidak bisa berbohong. Maka, setelah memaparkan peta biru "Indonesia Emas" di bab sebelumnya, narasi pembangunan memerlukan pilar-pilar kuantitatif untuk menopangnya. Bab ini adalah tentang pilar-pilar tersebut—deretan angka dari lembaga-lembaga terpercaya yang menjadi legitimasi bahwa sang raksasa tidak sedang bermimpi, melainkan benar-benar sedang melangkah maju.

Di tengah turbulensi ekonomi global yang diwarnai oleh perang geopolitik dan ancaman resesi di awal dekade 2020-an, fondasi pertama yang harus diamankan adalah stabilitas. Dan laporan dari Badan Pusat Statistik (BPS) serta Bank Indonesia (BI) secara konsisten menyajikan cerita tentang resiliensi. Angka pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) secara konsisten berhasil dipertahankan di atas ambang batas psikologis 5% per tahun, sebuah pencapaian yang menempatkan Indonesia di jajaran negara dengan performa ekonomi terbaik di antara G20. Pada saat yang sama, laju inflasi yang sempat menjadi momok berhasil dijinakkan dan dikendalikan dalam rentang target yang ditetapkan oleh bank sentral. Stabilitas ganda—pertumbuhan yang solid dan inflasi yang terjaga—ini menjadi fondasi kokoh yang memungkinkan pemerintah untuk mengeksekusi agenda-agenda pembangunan yang lebih ambisius.

lynk.id/digitera

Jika stabilitas adalah fondasinya, maka investasi adalah bahan bakarnya. Narasi pemerintah tentang "karpet merah untuk investor" tampaknya menemukan pembenarannya dalam data yang dirilis oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Reformasi struktural yang termanifestasi dalam Undang-Undang Cipta Kerja, yang dirancang untuk menyederhanakan perizinan dan menciptakan ekosistem bisnis yang lebih pasti, mulai menunjukkan hasilnya. Peringkat Kemudahan Berusaha (*Ease of Doing Business*) Indonesia terus membaik. Lebih penting lagi, aliran investasi asing langsung (FDI) terus mencatatkan rekor baru setiap tahunnya. Modal dari berbagai penjuru dunia tidak hanya masuk ke sektor-sektor tradisional, tetapi juga mulai merambah ke industri pengolahan dan teknologi tinggi. Bagi para perumus kebijakan, ini adalah sinyal jelas: kepercayaan dunia internasional terhadap prospek ekonomi Indonesia berada di titik yang sangat tinggi.

Kemenangan paling nyata dari pergeseran strategi ekonomi, dan validasi paling sahih dari mantra hilirisasi, tecermin dalam laporan neraca perdagangan. Selama lebih dari 40 bulan berturut-turut hingga pertengahan tahun 2025 ini, Indonesia mencatatkan surplus neraca perdagangan. Sebuah prestasi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Keajaiban ini, menurut analisis Kementerian Perdagangan dan para ekonom, didorong oleh perubahan fundamental dalam struktur ekspor. Nilai ekspor dari besi dan baja, feronikel, serta produk-produk turunan sawit dan mineral lainnya melonjak drastis, melampaui nilai impor barang modal dan konsumsi. Indonesia, pelan tapi pasti, tidak lagi hanya menjadi eksportir tanah dan batu, melainkan telah menjadi eksportir produk bernilai tambah yang dihargai lebih tinggi di pasar global.

Namun, di balik angka-angka ekonomi makro yang kokoh ini, ada sebuah revolusi lain yang berjalan lebih senyap namun tak kalah dahsyat: revolusi digital. Data dari berbagai sumber melukiskan gambaran sebuah bangsa yang tengah bertransformasi menjadi raksasa digital Asia Tenggara. Nilai transaksi *e-commerce* telah meroket melewati angka psikologis ribuan

triliun rupiah per tahun. Jumlah perusahaan rintisan (*startup*) berstatus *unicorn* (valuasi di atas US$1 miliar) dan bahkan *decacorn* (valuasi di atas US$10 miliar) menjadi yang terbanyak di kawasan. Tingkat penetrasi internet dan penggunaan ponsel pintar telah menyentuh hampir seluruh lapisan masyarakat, menciptakan sebuah pasar digital yang masif dan penuh potensi.

Jika Bab 1 adalah peta perjalanannya, maka bab ini adalah panel dasbor yang menunjukkan semua indikator berwarna hijau. Pertumbuhan stabil, investasi mengalir deras, neraca perdagangan positif, dan ekonomi digital meledak. Dari perspektif makroekonomi, semua mesin tampak berfungsi dengan sempurna. Argumennya kuat: visi besar itu bukan isapan jempol, karena angka-angka telah berbicara.

Namun, di balik statistik yang mengesankan ini, ada sebuah narasi lain yang lebih dinamis, lebih personal, dan lebih sulit diukur dengan angka semata. Narasi tentang ide, kreativitas, dan harapan dari generasi baru yang membangun ekonomi di dunia maya. Narasi inilah yang akan kita jelajahi di bab selanjutnya.

lynk.id/digiterra

Bab 3
Episentrum Digital ASEAN:
Narasi Startup dan Ekonomi Pengetahuan

Jika angka-angka di bab sebelumnya adalah kerangka besi yang menopang tubuh sang raksasa, maka narasi di bab ini adalah jiwa yang memberinya denyut kehidupan. Di luar laporan statistik dan proyek-proyek negara yang masif, sebuah revolusi lain sedang berlangsung—revolusi yang lahir bukan dari ruang rapat kementerian, melainkan dari kamar-kamar kos yang sempit, dari kafe-kafe yang riuh dengan suara ketikan laptop, dan dari garasi-garasi yang disulap menjadi kantor darurat. Ini adalah kisah tentang para pahlawan baru di era pembangunan Indonesia: anak-anak muda berkaus oblong dan bersepatu kets yang membangun kerajaan bisnis bernilai miliaran dolar dari barisan kode digital.

Selama satu dekade terakhir, sebuah mitologi modern telah lahir dan menyebar di kalangan generasi milenial dan Gen Z Indonesia. Ini adalah kisah-kisah para pendiri *startup* yang kini namanya terpampang di berbagai media bisnis internasional. Sebuah narasi arketipal yang nyaris seragam: berawal dari sebuah masalah sehari-hari yang membuat frustrasi, sebuah ide solusi yang tercetus di tengah malam, penolakan dari puluhan investor pertama, lalu kegigihan yang akhirnya membuahkan hasil. Puncaknya adalah momen sakral ketika mereka, yang dulu bukan siapa-siapa, berdiri di panggung Bursa Efek Indonesia, membunyikan lonceng tanda penawaran saham perdana (IPO) perusahaan yang mereka rintis dari nol. Kisah-kisah ini menjadi semacam Injil bagi generasi baru, menyebarkan keyakinan bahwa modal terpenting di abad ke-21 bukanlah warisan atau koneksi, melainkan ide brilian dan eksekusi yang tak kenal lelah.

lynk.id/digiterra

Namun, revolusi digital tidak hanya milik para teknokrat di menara-menara perkantoran. Ia menjelma dalam bentuk yang lebih merakyat dan terlihat di setiap sudut jalanan kota-kota besar: ribuan jaket berwarna hijau dan oranye yang melesat lincah di antara kemacetan. Inilah wajah dari *gig economy*, sebuah model ekonomi baru yang menurut para pendukungnya adalah bentuk paling murni dari demokratisasi ekonomi. Jutaan orang yang sebelumnya sulit menembus pasar kerja formal kini memiliki akses instan untuk mendapatkan penghasilan.

Narasi yang dibangun adalah tentang fleksibilitas dan pemberdayaan. Seorang ibu rumah tangga bisa mendapatkan penghasilan tambahan dengan menjual kue buatannya secara online. Seorang mahasiswa bisa membiayai kuliahnya dengan menjadi pengemudi ojek paruh waktu. Seorang kepala keluarga bisa menjadi kurir logistik tanpa terikat jam kantor yang kaku. Mereka, dalam narasi ini, adalah CEO bagi usaha mereka sendiri, manajer bagi waktu mereka sendiri. *Gig economy* dipandang sebagai katup pengaman sosial sekaligus akselerator inklusi ekonomi, memberikan kesempatan bagi siapa saja yang mau bekerja, kapan saja dan di mana saja.

Fenomena lokal yang semarak ini dengan cepat menarik perhatian global. Keyakinan terhadap potensi Indonesia tidak hanya datang dari pemerintahnya sendiri, tetapi juga dari pusat-pusat modal dunia. Dalam beberapa tahun terakhir, terjadi sebuah "banjir" investasi dari dana-dana modal ventura (*Venture Capital*) raksasa yang berbasis di Silicon Valley, Singapura, Tokyo, dan Beijing. Mereka tidak hanya menanamkan modal pada perusahaan yang sudah mapan, tetapi juga berlomba-lomba mendanai ide-ide paling awal dari para pendiri yang belum terbukti. Bagi para analis, ini adalah mosi percaya yang paling kuat. Para investor ini tidak hanya bertaruh pada satu atau dua perusahaan; mereka bertaruh pada masa depan demografi dan daya beli konsumen Indonesia, serta pada kreativitas dan daya juang talenta-talenta digitalnya.

lynkid/digilera

Semua kepingan ini—kisah sukses para pendiri, pemberdayaan ekonomi gig, dan banjir modal ventura—pada akhirnya mengerucut pada sebuah visi pamungkas: lahirnya sebuah Masyarakat Berbasis Pengetahuan (*Knowledge-Based Society*). Ini adalah impian untuk melakukan lompatan kuantum, melepaskan diri dari apa yang oleh banyak ekonom disebut sebagai "kutukan sumber daya alam". Sebuah masa depan di mana ekspor terbesar Indonesia bukanlah lagi batu bara atau minyak sawit, melainkan barisan kode-kode perangkat lunak yang digunakan di seluruh dunia, paten-paten bioteknologi yang lahir dari kekayaan hayati nusantara, dan film-film animasi atau konten kreatif yang memukau penonton global.

Inilah puncak dari janji pembangunan sang raksasa: sebuah bangsa yang tidak hanya kuat secara fisik dan kaya secara materi, tetapi juga cerdas, inovatif, dan menjadi episentrum dari ekonomi pengetahuan di kawasan Asia Tenggara. Dengan ini, Bagian I dari narasi kita selesai. Panggung kemegahan telah dibangun dengan kokoh. Visi, data, dan cerita optimisme telah dipaparkan secara utuh.

lynk.id/digterra

BAGIAN II:
RETAK DI KAKI KACA

Narasi yang megah selalu memiliki titik buta, sebuah ruang gelap di mana biaya tersembunyi dari sebuah kemajuan ditumpuk. Setelah menengadah pada siluet sang raksasa yang menjulang tinggi di Bagian I, kini saatnya kita menunduk dan memeriksa fondasi tempatnya berpijak. Di bagian ini, kita akan meninggalkan ruang rapat berpendingin udara dan data statistik yang rapi. Kita akan berganti lensa.

Perjalanan kita akan masuk ke lantai pabrik yang panas, ke dapur-dapur rumah tangga yang berjuang, ke lahan-lahan sengketa yang berdebu, dan ke tepian sungai yang menghitam. Kita akan mengganti angka dengan kesaksian, mengganti proyeksi dengan pengalaman. Inilah perjalanan untuk menelisik retak-retak di kaki kaca sang raksasa, dimulai dari degup jantung pertamanya: industri.

lynk.id/digiterra

Bab 4
Efisiensi sebagai Senjata Makan Tuan: Senyapnya Lantai Pabrik

Bau sangit oli panas dan debu besi yang tajam adalah parfum yang telah dihirup Suryo selama dua puluh tahun terakhir. Selama itu pula, telinganya telah terbiasa dengan orkestra bising dari lantai pabrik perakitan otomotif di Cikarang ini: desingan mesin bor, dentuman palu, dan derit konveyor yang bergerak tanpa henti. Namun, suara yang paling dominan adalah suara manusia—celotehan, tawa, teriakan sesama rekan kerja yang menjadi penanda bahwa mereka adalah sebuah komunitas, bukan sekadar sekrup dalam mesin besar. Di antara deru mesin, ada sebuah tarian ritmis dari ratusan lengan manusia yang dengan cekatan memasang kabel, mengencangkan baut, dan merakit komponen menjadi sebuah kerangka mobil.

Lalu, enam bulan lalu, orkestra itu mulai berubah.

Mereka datang dalam peti-peti kayu besar bertuliskan “Made in Germany”. Lengan-lengan robot berwarna oranye terang, yang dipasang satu per satu di sepanjang lini perakitan. Mereka tidak berceloteh, tidak tertawa, dan tidak pernah lelah. Gerakan mereka adalah presisi yang dingin dan matematis, sebuah balet mekanis yang seratus kali lebih cepat dan seribu kali lebih akurat daripada tarian lengan manusia manapun. Dalam rapat singkat yang dipimpin oleh seorang manajer muda, kata-kata kunci dari Bagian I buku ini kembali terdengar: “Efisiensi. Produktivitas. Pengurangan *human error*. Ini adalah langkah maju untuk daya saing perusahaan di tingkat global.”

lynk.id/digiterra

Bagi Suryo dan lima ratus rekannya di lini perakitan, langkah maju itu terasa seperti jurang yang menganga di depan mata.

Pengumumannya datang tiga bulan kemudian, di sebuah aula serbaguna yang terasa sesak dan pengap. Staf HRD membacakan daftar nama dengan nada datar dari selembar kertas. Nama Suryo ada di urutan ke-273. Istilah yang digunakan adalah "rasionalisasi karyawan sebagai dampak dari program optimalisasi berbasis teknologi." Sebuah kalimat panjang dan berbunga untuk satu kata yang brutal: PHK.

Di meja pesangon, Suryo menatap angka yang tertera di atas kertas. Angka yang terasa jauh lebih kecil dari yang selalu ia dan teman-temannya perbincangkan di warung kopi, angka yang dihitung oleh senior-seniornya yang di-PHK lima tahun lalu.

"Aturannya sudah baru, Pak," kata staf HRD itu, menghindari tatapan mata Suryo. "Kita mengacu pada Perppu Cipta Kerja. Perhitungannya sudah sesuai dengan peraturan pemerintah yang berlaku."

Suryo tidak membantah. Ia hanya menandatangani kertas itu dengan tangan yang sedikit gemetar. Di luar sana, ia tahu gelombang senyap ini sedang terjadi di mana-mana—di pabrik tekstil, di gudang logistik, di pabrik makanan dan minuman. Ribuan orang seperti dirinya, yang telah mengabdikan hidup mereka pada satu keahlian, kini mendapati keahlian itu usang dalam semalam.

Janji pemerintah akan program *reskilling* atau pelatihan ulang terdengar seperti fatamorgana. Suryo mendaftar. Setelah mengantre selama dua hari, ia mendapatkan jadwal pelatihan tiga minggu. Bukan untuk mengoperasikan atau merawat lengan-lengan robot oranye yang menggantikan pekerjaannya, melainkan pelatihan membuat kue donat dan sabun cair. "Untuk bekal wirausaha," kata instrukturnya. Suryo hanya bisa tersenyum getir. Bagaimana ia bisa bersaing dengan ribuan orang lainnya yang juga tiba-tiba menjadi "wirausahawan" donat dan sabun cair?

lynk.id/aksiterra

Malam itu, Suryo berdiri di seberang jalan, menatap pagar pabrik tempat ia menghabiskan separuh hidupnya. Orkestra bising yang dulu ia kenal telah tiada. Yang terdengar kini adalah sebuah dengungan monoton yang lebih efisien, lebih teratur, dan lebih senyap. Tidak ada lagi tawa, tidak ada lagi teriakan. Hanya dengung presisi dari mesin-mesin yang tak pernah butuh istirahat, bonus, ataupun pesangon.

Ia teringat kata-kata manajer muda itu: “langkah maju”. Suryo bertanya dalam hati, maju untuk siapa? Jika sebuah kemajuan diukur dari senyapnya suara manusia di lantai pabrik, ia tidak yakin ingin ikut melangkah ke sana.

lynk.id/digiterra

Bab 5
Dapur yang Tak Lagi Mengepul:
Angka vs. Realita di Meja Makan

Di atas kertas presentasi para ekonom di Jakarta, inflasi tampak seperti seekor naga yang berhasil dijinakkan. Grafiknya melandai, angkanya berada dalam rentang target yang aman, dan ia menjadi salah satu bukti keberhasilan stabilitas ekonomi makro. Namun, di lorong-lorong Pasar Cikutra yang becek di Bandung, di pasar-pasar tradisional di seluruh nusantara, naga itu terasa sangat nyata dan buas, menyemburkan api yang membakar isi dompet setiap hari. Bab ini adalah tentang jurang menganga antara inflasi sebagai angka statistik dan inflasi sebagai pengalaman sehari-hari.

Untuk memahami jurang ini, tim kami melakukan sebuah eksperimen jurnalistik sederhana yang kami sebut “Indeks Harga Warteg”. Metodenya sederhana: setiap bulan, selama setahun terakhir, kami mengunjungi warung tegal yang sama di tiga kota berbeda—Jakarta, Surabaya, dan Makassar—dan memesan menu yang sama persis: sepiring nasi, telur dadar, orek tempe, dan tumis kangkung. Kami mencatat harganya dengan teliti.

Awalnya, kenaikannya hanya lima ratus perak, nyaris tak terasa. Tiga bulan kemudian, harganya melonjak seribu rupiah. Enam bulan kemudian, harganya tetap, namun porsi nasinya terasa sedikit menyusut dan irisan tempenya semakin tipis. Menjelang akhir tahun, total harga untuk menu sederhana itu telah naik rata-rata sebesar 25%. Sebuah angka yang jauh panggang dari api jika dibandingkan dengan data inflasi pangan resmi dari BPS yang dilaporkan berada di kisaran 5-6% pada periode yang sama. Indeks Warteg ini mungkin tidak ilmiah, tetapi ia menangkap sebuah

lynk.id/digiterra

kebenaran yang dirasakan oleh jutaan perut di seluruh Indonesia: harga kebutuhan pokok meroket jauh lebih cepat daripada yang diakui oleh angka-angka resmi.

Kenyataan ini dialami langsung oleh Ibu Wati, seorang buruh garmen di KBN Cakung yang cukup beruntung tidak ikut dalam gelombang PHK. Baginya, setiap kenaikan harga seribu perak di pasar adalah sebuah kalkulasi ulang yang rumit untuk anggaran dapurnya. Upahnya tidak naik signifikan selama dua tahun terakhir, hanya penyesuaian UMP yang ia sebut "cukup untuk mengganti kenaikan harga beras saja."

Pukulan berikutnya datang bukan dari pasar, melainkan dari slip gajinya sendiri. Pada bulan Mei 2025, ia melihat ada baris potongan baru yang belum pernah ada sebelumnya: "Iuran Tapera". Ia tidak begitu paham apa itu, hanya mendengar selentingan dari teman-temannya bahwa itu adalah tabungan paksa dari pemerintah untuk perumahan.

"Rumah?" gumamnya saat bercerita kepada kami di depan kontrakannya yang sempit. "Untuk bayar kontrakan dan sekolah anak saja sudah megap-megap. Gaji tidak naik, harga-harga meroket, sekarang ada potongan baru lagi. Untuk rumah yang entah kapan bisa kami miliki."

Rasa frustrasi Ibu Wati adalah gema dari sentimen publik yang lebih luas. Di saat yang sama, para mahasiswa di berbagai kota turun ke jalan, memprotes kenaikan Uang Kuliah Tunggal (UKT) yang dianggap tidak masuk akal. Bagi keluarga seperti Ibu Wati yang bermimpi menyekolahkan anaknya hingga ke jenjang perguruan tinggi, kenaikan UKT terasa seperti pintu yang dibanting tepat di depan wajah mereka. Beban hidup terasa datang dari segala arah, sementara jaring pengaman terasa semakin tipis.

Dalam himpitan inilah, sebuah solusi semu yang berbahaya menemukan mangsanya. Budi, seorang pengemudi ojek online di Bandung yang kami temui, menceritakannya dengan suara pelan. Pendapatannya yang tak menentu seringkali tidak cukup untuk menutupi kebutuhan

lynk.id/digiterra

mendesak: ban motor yang harus diganti, atau biaya daftar ulang sekolah anaknya. Bank menolaknya karena tidak punya slip gaji tetap. Di tengah keputusasaan itulah, iklan di media sosial menawarkan jalan keluar instan. Pinjaman online ilegal, atau *pinjol*.

"Syaratnya mudah, Mas. Hanya KTP dan foto *selfie*. Lima menit, uang satu juta langsung masuk ke rekening," tuturnya. Namun, kemudahan itu datang dengan bunga yang mencekik dan teror yang tak terbayangkan. Ketika ia telat membayar dua hari, ponselnya mulai dibanjiri pesan WhatsApp dari nomor-nomor tak dikenal. Foto KTP-nya disebar di grup-grup kontak, disertai kata-kata makian dan tuduhan sebagai penipu. Tidurnya tak lagi nyenyak, setiap dering notifikasi membuatnya berdebar cemas.

Kisah Ibu Wati dan Budi adalah kepingan-kepingan mozaik dari sebuah realitas ekonomi yang lebih besar. Di menara-menara perkantoran, para analis mungkin merayakan terkendalinya inflasi inti dan stabilitas makroekonomi. Namun di dapur-dapur di gang-gang sempit, kepulan asap tak lagi sama. Ia lebih tipis, lebih hemat, dan beraroma kecemasan. Naga inflasi mungkin tampak jinak di atas kertas, tetapi apinya terasa membakar di meja makan.

lynk.id/digiterna

Bab 6
Tanah Kami, Proyek Kalian:
Peta Konflik di Balik Peta Pembangunan

Di ruang-ruang rapat Bappenas yang sejuk di Jakarta, peta Indonesia adalah sebuah kanvas yang bersih dan penuh potensi. Garis-garis tegas ditarik untuk menandai jalan tol baru, zona-zona diwarnai untuk kawasan industri khusus, dan titik-titik merah ditebar untuk lokasi smelter dan pelabuhan masa depan. Di atas peta itu, pembangunan adalah sebuah proses yang logis, teratur, dan penuh janji kemajuan.

Namun, ketika peta teknokratik itu diturunkan ke atas tanah, ia menimpa peta-peta lain yang lebih tua, yang tidak tercetak di atas kertas HVS, melainkan terukir dalam ingatan dan alur kehidupan generasi. Peta ladang tadah hujan, peta wilayah tangkap nelayan, peta hutan adat tempat arwah leluhur bersemayam. Bab ini adalah tentang benturan keras antara dua peta tersebut. Tentang bagaimana Proyek Strategis Nasional (PSN) yang diagungkan di ibu kota seringkali menjadi sumber konflik dan air mata di pelosok negeri.

Gema dari luka yang belum kering masih terdengar jelas. Nama-nama seperti Wadas di Jawa Tengah dan Rempang di Kepulauan Riau telah terpatri dalam kesadaran publik. Bukan lagi sebagai nama desa biasa, tetapi sebagai simbol perlawanan. Wadas, dengan batu andesitnya yang dianggap keramat, harus menghadapi barisan aparat demi proyek bendungan. Rempang, dengan kampung-kampung tua Melayunya, harus berhadapan dengan rencana pembangunan "Eco-City" yang mengancam menggusur mereka dari tanah leluhurnya. Kisah-kisah ini menjadi preseden, sebuah pengingat muram bahwa di balik setiap pita peresmian proyek, seringkali

lynk.id/digitoria

ada cerita tentang negosiasi yang buntu, intimidasi, dan perlawanan warga yang mempertahankan ruang hidupnya.

Kini, di pertengahan tahun 2025, front-front konflik baru terus bermunculan, didorong oleh ambisi hilirisasi yang sama yang dipuji-puji di Bab 1.

Perjalanan menyusuri pesisir tenggara Sulawesi kini adalah perjalanan melintasi dua zaman. Di satu sisi, perkampungan nelayan tradisional masih berdiri, dengan perahu-perahu sandar yang catnya mulai pudar. Di sisi lain, hanya beberapa kilometer jauhnya, kompleks smelter nikel raksasa menjulang seperti katedral industri, dengan cerobong asap yang mengepulkan asap kelabu ke langit biru.

“Dulu kami melaut di depan sana, Mas,” ujar Pak Hasan, seorang nelayan berusia 50-an tahun sambil menunjuk ke arah teluk yang airnya kini berwarna keruh kemerahan. “Sekarang, jangankan ikan, kepiting pun lari. Airnya kadang terasa hangat, warnanya merah kalau limbahnya lagi dibuang. Kami harus melaut lebih jauh, lebih lama, biayanya lebih besar, hasilnya tak menentu.” Tanah tempat ia membangun rumahnya kini diapit oleh jalan hauling perusahaan dan mess para pekerja asing. Ia berkali-kali ditawari ganti rugi, namun ia menolak. "Ini bukan soal uang," katanya lirih. "Ini tanah tempat ari-ari bapak saya ditanam."

Pemandangan serupa, dengan komoditas berbeda, terjadi di pedalaman Kalimantan. Di sana, hamparan hijau yang monoton dari perkebunan kelapa sawit terus merangsek, seringkali masuk ke wilayah yang telah dihuni oleh masyarakat adat selama berabad-abad. Bagi sebuah korporasi yang berbekal Izin Usaha Perkebunan dari pemerintah pusat, hutan di depan mereka adalah aset yang belum produktif. Namun bagi masyarakat Dayak di sana, hutan itu adalah ibu.

“Hutan itu supermarket kami, apotek kami, sekaligus gereja kami,” jelas seorang tetua adat. “Kami mengambil rotan dan berburu babi

lynk.id/digiterra

secukupnya. Kami tahu daun mana yang bisa jadi obat demam. Dan di pohon-pohon besar itu, kami percaya arwah para leluhur bersemayam." Ketika buldoser datang meratakan hutan adat mereka untuk ditanami sawit, yang hilang bukan hanya sumber ekonomi, tetapi juga identitas, spiritualitas, dan sejarah.

Ketika dialog buntu dan buldoser tetap datang, perlawanan seringkali menjadi satu-satunya pilihan. Dan di sinilah babak paling tragis dari konflik ini dimulai: kriminalisasi. Laporan tahunan dari lembaga-lembaga seperti WALHI, LBH, dan KontraS menunjukkan tren yang terus mengkhawatirkan. Petani yang mempertahankan petak sawahnya dituduh melakukan "penyerobotan lahan milik perusahaan". Warga adat yang memblokade jalan hauling dicap sebagai "provokator" dan dijerat pasal-pasal pidana. Bahkan, aktivis muda yang mengunggah video penggusuran di media sosial bisa terancam oleh Undang-Undang ITE. Hukum, yang seharusnya menjadi perisai bagi yang lemah, dalam banyak kasus justru terasa menjadi senjata bagi yang kuat.

Maka, narasi pembangunan kembali menunjukkan wajah gandanya. Di satu sisi, ada peresmian proyek yang dihadiri para pejabat, diiringi janji penyerapan tenaga kerja dan pertumbuhan ekonomi daerah. Di sisi lain, di lokasi yang sama, ada garis polisi yang melintang, ada tangis warga yang kehilangan tanah, dan ada para pejuang lingkungan yang harus mendekam di balik jeruji besi.

Jika tanah dan manusianya telah menjadi korban, lalu apa yang terjadi pada alam itu sendiri—pada sungai, udara, dan laut yang menjadi saksi bisu dari semua ini? Pertanyaan itu membawa kita ke bab berikutnya dari penelusuran retak di kaki kaca sang raksasa.

lynk.id/digiera

Bab 7
Sungai yang Sekarat, Udara yang Meracuni: Biaya Ekologis yang Tak Tercatat

Dalam setiap kalkulasi ongkos produksi dan laporan laba-rugi perusahaan, selalu ada sebuah kolom yang sengaja dikosongkan. Kolom itu bernama: biaya lingkungan. Ia adalah biaya yang tak pernah masuk dalam neraca, sebuah "eksternalitas" yang dibebankan kepada korban yang tak bisa berteriak—kepada sungai yang airnya menghitam, udara yang menyesakkan napas, dan hutan yang diam-diam menghilang. Bab ini adalah upaya untuk memberikan suara kepada mereka, untuk melakukan audit lingkungan terhadap janji-janji kemajuan yang dipaparkan di Bagian I.

Perjalanan kita dimulai dengan berdiri di tepi Sungai Citarum di wilayah Majalaya, Bandung Selatan. Di sore hari pada bulan Juni 2025 ini, airnya bukan lagi bening, melainkan berwarna-warni seperti pelangi yang sakit—kadang merah pekat, kadang biru legam, tergantung limbah apa yang baru saja digelontorkan oleh ratusan pabrik tekstil di hulunya. Bau kimia yang menusuk hidung sudah menjadi bagian dari udara yang dihirup warga sehari-hari. Ironisnya, industri tekstil inilah salah satu pahlawan ekspor yang dibanggakan dalam data neraca perdagangan. Di sini, di tepi sungai ini, kita melihat harga dari sehelai kaus murah atau celana jins yang diekspor ke seluruh dunia.

Seorang petani tua yang kami temui di pematang sawah menunjukkan padinya yang kerdil. “Sudah sepuluh tahun terakhir begini, Jang. Air dari sungai ini yang kami pakai untuk irigasi. Padinya jadi sering gagal panen, daunnya kuning. Kalaupun tumbuh, kami sendiri takut memakannya,”

katanya pasrah. Kisahnya adalah potret mikro dari sebuah tragedi ekologis masif: sungai yang memberi kehidupan kini justru menyebar racun.

Dari air, kita beralih ke udara. Di kota-kota industri seperti Gresik di Jawa Timur atau di sekitar lingkar tambang Morowali di Sulawesi Tengah, langit biru seringkali menjadi barang langka. Ia tergantikan oleh selimut kabut asap berwarna kelabu kecokelatan yang permanen, membawa serta partikel debu yang membuat napas terasa berat dan sesak. Sumbernya bukan rahasia. Di cakrawala, menara-menara kembar Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) batu bara berdiri angkuh. Mereka adalah jantung yang memompa listrik untuk smelter-smelter nikel dan pabrik-pabrik lainnya—jantung yang sama yang memuntahkan ribuan ton polutan ke udara. Data dari puskesmas-puskesmas lokal menunjukkan tren yang tak bisa dimungkiri: lonjakan kasus Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA), terutama pada anak-anak dan lansia. Kemajuan industri di sini dibayar dengan setiap tarikan napas yang menyakitkan.

Ancaman terhadap lingkungan tidak hanya datang dari limbah dan polusi, tetapi juga dari kebijakan yang dilegitimasi oleh stempel resmi. Ancaman terbesar bagi hutan Indonesia saat ini bukanlah lagi para pembalak liar yang bersembunyi, melainkan buldoser-buldoser yang bekerja di bawah restu izin dan analisis dampak lingkungan (AMDAL) yang seringkali dipertanyakan. Atas nama proyek “strategis” seperti pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) atau program *Food Estate* untuk ketahanan pangan, ratusan ribu hektar hutan primer dan lahan gambut telah dan akan terus dikonversi. Citra satelit dari tahun ke tahun menunjukkan sebuah luka yang terus menganga pada paru-paru dunia, melepaskan cadangan karbon raksasa ke atmosfer dan menghancurkan keanekaragaman hayati yang tak ternilai harganya. Ini adalah deforestasi “legal” yang didanai oleh negara.

Akhirnya, perjalanan audit ini membawa kita ke pesisir, kembali ke episentrum hilirisasi nikel. Setelah bijih nikel yang berharga diekstrak, ia

lpk.id/digilena

meninggalkan jutaan ton tanah sisa atau *tailing*. Penanganannya seringkali menjadi masalah besar. Di beberapa lokasi, limpasan dari tumpukan tanah sisa ini mengalir ke sungai dan berakhir di laut, mengubah pesisir yang jernih menjadi hamparan lumpur merah kecokelatan. Terumbu karang yang dulunya penuh warna dan kehidupan kini menjadi kuburan kapur yang pucat, mematikan area pemijahan ikan dan merampas sumber penghidupan nelayan seperti Pak Hasan yang kita temui di bab sebelumnya. Laut yang memberi hidup kini sekarat.

Sungai yang diracuni, udara yang menyesakkan, hutan yang dibabat, dan laut yang tercemar. Semua ini adalah biaya riil dari pembangunan. Biaya yang tidak akan pernah Anda temukan dalam laporan tahunan perusahaan atau dalam pidato kenegaraan tentang pertumbuhan PDB. Kerusakan ini terjadi di depan mata, seringkali dengan justifikasi hukum dan atas nama kemajuan.

Ini memunculkan pertanyaan yang lebih dalam dan fundamental: Mengapa ini semua bisa terus terjadi? Siapa yang merancang sistem yang memungkinkan keuntungan ekonomi diagungkan di atas keberlangsungan hidup manusia dan alam itu sendiri? Untuk menjawabnya, kita harus beralih dari lapangan ke arsitektur kekuasaan yang tak terlihat, yang akan kita bedah di bagian selanjutnya.

lynk.id/digiera

BAGIAN III:
MENDIAGNOSIS PARADOKS

Jika Bagian II adalah sebuah ruang gawat darurat yang dipenuhi pasien—buruh yang kehilangan pekerjaan, petani yang terusir dari tanahnya, dan alam yang sekarat—maka Bagian III adalah laboratorium patologi tempat kita memeriksa sampel jaringan di bawah mikroskop. Kita tidak lagi hanya akan bertanya "apa yang terjadi?", melainkan akan mengejar pertanyaan yang jauh lebih fundamental dan meresahkan: "Mengapa ini bisa terjadi?"

Apakah semua penderitaan dan kerusakan ini hanyalah efek samping yang tak terhindarkan dari sebuah proses pembangunan yang sulit? Ataukah ini adalah hasil dari sebuah desain, sebuah sistem yang secara inheren cacat? Jawabannya, seperti yang akan kita urai dalam bagian ini, ternyata lebih menggelisahkan: sistem ini tidak rusak, ia bekerja persis seperti yang dirancang oleh para arsiteknya. Kita akan membongkar arsitektur kekuasaan itu, menelisik krisis kepercayaan yang diakibatkannya, dan memahami bagaimana kegagalan-kegagalan sistemik ini diciptakan.

lynk.id/digiterra

Bab 8
Arsitektur Ketidakadilan:
Oligarki dan Liga Korupsi Indonesia

Kata "oknum" adalah kata paling nyaman dalam leksikon politik Indonesia. Ketika sebuah skandal korupsi terungkap atau sebuah kebijakan terbukti merugikan rakyat, kata inilah yang seringkali menjadi tameng: ini bukan salah sistemnya, hanya ulah beberapa "oknum" nakal. Kata ini menenangkan karena ia menyiratkan bahwa masalahnya bersifat personal dan terbatas, bukan struktural dan meluas. Namun, setelah menyaksikan pola masalah yang konsisten dari Sabang sampai Merauke di bab-bab sebelumnya, kita harus berani menyimpulkan: menyalahkan "oknum" sama seperti menyalahkan tetesan hujan saat badai, tanpa pernah bertanya tentang awan gelap yang menghasilkannya.

Awan gelap itu memiliki nama: oligarki. Sebuah istilah yang terdengar akademis, namun praktiknya terasa begitu nyata dalam kehidupan sehari-hari. Sederhananya, oligarki adalah fusi atau perkawinan sedarah antara kekuatan modal (kekayaan) dan kekuatan politik (kekuasaan). Di Indonesia, struktur ini berdiri di atas sebuah kursi dengan tiga kaki yang saling menopang dan tak terpisahkan: pengusaha sebagai pemilik modal, politisi sebagai pemegang regulasi, dan aparat sebagai penegak—atau pelonggar—aturan. Seorang taipan pertambangan juga mendanai partai politik terbesar. Seorang jenderal purnawirawan langsung menduduki kursi komisaris di perusahaan energi. Seorang ketua partai politik memiliki kerajaan media yang membentuk opini publik. Ini adalah lingkaran tertutup di mana kepentingan bisnis dan kebijakan publik menjadi satu dan tak terbedakan.

lynk.id/digitorra

Mekanisme utama yang dijalankan oleh arsitektur ini disebut *Regulatory Capture*, atau "pembajakan regulasi". Ini adalah sebuah kondisi ketika lembaga regulator yang seharusnya mengawasi sebuah industri justru "disandera" dan pada praktiknya melayani kepentingan industri yang diawasinya. Mahakarya dari proses ini dapat kita lihat pada proses lahirnya beberapa undang-undang paling kontroversial dalam beberapa tahun terakhir, seperti UU Cipta Kerja dan revisi UU Minerba. Proses penyusunannya berjalan kilat, minim partisipasi publik yang bermakna, namun sarat dengan masukan dari asosiasi-asosiasi pengusaha besar. Protes dari serikat buruh, aktivis lingkungan, dan akademisi dianggap angin lalu. Hasilnya adalah sebuah produk hukum yang memberikan karpet merah bagi investasi dengan mengorbankan perlindungan bagi buruh dan lingkungan.

Ketika arsitektur kekuasaan ini telah mapan, korupsi pun berevolusi. Ia tidak lagi sekadar praktik suap-menyuap di bawah meja untuk sebuah proyek. Per Juni 2025, korupsi di Indonesia telah naik kelas menjadi sebuah "Liga Korupsi". Disebut liga karena ia memiliki pemain-pemain elite yang sama, aturan main yang tak tertulis, dan wasit—sistem hukum—yang seolah tak berdaya. Pelanggaran yang dilakukan bukan lagi sekadar mark-up anggaran, melainkan "perdagangan kebijakan", di mana sebuah pasal dalam undang-undang bisa dipesan untuk menguntungkan satu kelompok industri tertentu.

Syarat utama agar liga ini bisa terus berjalan aman adalah dengan melemahkan penjaga gawangnya. Pelemahan sistematis terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui revisi undang-undang beberapa tahun lalu adalah langkah strategis untuk memastikan para pemain di liga ini bisa terus bermain tanpa takut terkena kartu merah. Hasilnya adalah sebuah ironi: indeks persepsi korupsi stagnan, sementara kasus-kasus besar yang melibatkan aktor-aktor kelas kakap jarang sekali tersentuh hingga tuntas.

lynk.id/digiterra

Maka, semua yang kita saksikan di Bagian II—PHK massal yang dilegalkan, penggusuran atas nama PSN, hingga pembiaran terhadap perusakan lingkungan—bukanlah kecelakaan. Mereka adalah konsekuensi logis dari sebuah mesin yang dirancang untuk mengakumulasi keuntungan bagi segelintir arsiteknya, dengan biaya yang dibebankan kepada seluruh penghuni bangunan.

Ketika arsitektur ini berdiri dengan begitu kokoh dan angkuh, sebuah fondasi lain yang tak terlihat, yang jauh lebih fundamental bagi sebuah bangsa, mulai terkikis hingga ke dasarnya: kepercayaan. Itulah yang akan kita periksa di bab selanjutnya.

lynk.id/digiterra

Bab 9
Krisis Kepercayaan:
Erosi Modal Sosial dari Dalam dan Luar

Jika oligarki dan korupsi sistemik yang kita bedah di bab sebelumnya adalah kanker yang menggerogoti organ-organ negara, maka krisis kepercayaan adalah penyakit autoimun yang diakibatkannya—sebuah kondisi di mana tubuh bangsa ini mulai menyerang dirinya sendiri. Kerusakan yang ditimbulkan tidak terlihat secara kasat mata seperti sungai yang tercemar atau hutan yang gundul, namun ia jauh lebih fundamental. Ia adalah erosi modal sosial, fondasi tak terlihat yang merekatkan sebuah masyarakat. Serangan ini datang dari dua arah: ketidakpercayaan dari luar, dan kerapuhan dari dalam.

Di panggung global, narasi pemerintah tentang "karpet merah untuk investor" memang berhasil menarik sejumlah besar modal, terutama ke sektor-sektor ekstraktif yang menjanjikan keuntungan kilat. Namun, di balik angka-angka investasi langsung (FDI) yang dibanggakan itu, ada sebuah kalkulasi tak tertulis yang selalu dilakukan oleh investor berkualitas. Kalkulasi itu bernama "*Indonesia Risk Premium*"—sebuah "pajak" risiko tak resmi yang harus mereka perhitungkan untuk menutupi ketidakpastian hukum, inkonsistensi regulasi, dan tentu saja, "biaya siluman" atau pungli di setiap tingkatan birokrasi.

Investor yang bergerak di sektor padat modal dan sumber daya alam mungkin sudah terbiasa bermain di air keruh dan bersedia membayar premi risiko ini. Namun, investor berkualitas yang ingin membangun pusat riset dan pengembangan (R&D) jangka panjang, pabrik semikonduktor, atau industri teknologi canggih lainnya—jenis investor yang sesungguhnya

lynk.id/digiterra

dibutuhkan Indonesia untuk melompat ke level berikutnya—akan berpikir dua kali. Bisnis mereka bergantung pada prediktabilitas, perlindungan hak kekayaan intelektual, dan penegakan kontrak yang adil. Semua itu adalah hal yang mustahil dijamin oleh sebuah sistem yang dikendalikan oleh "liga korupsi", di mana aturan bisa berubah tergantung siapa yang berkuasa. Akibatnya, Indonesia seringkali hanya mendapatkan investasi yang mengeruk, bukan investasi yang membangun kapasitas.

Namun, erosi kepercayaan dari luar ini tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan pembusukan yang terjadi dari dalam. Di jantung sistem kemasyarakatan Indonesia, bersemayam sebuah kultur yang menjadi antitesis dari kemajuan: kultur "orang dalam". Dari urusan sepele seperti mendapatkan surat izin mengemudi tanpa tes, hingga urusan besar seperti rekrutmen Pegawai Negeri Sipil atau memenangkan tender proyek pemerintah, frasa "ada kenalan orang dalam?" menjadi kunci yang lebih sakti daripada kompetensi atau kualifikasi.

Budaya inilah yang secara perlahan tapi pasti membunuh meritokrasi. Kompetensi dikalahkan oleh koneksi; prestasi ditaklukkan oleh privilese. Anak muda yang cerdas dan berintegritas menjadi frustrasi karena melihat posisi-posisi strategis diisi bukan oleh yang terbaik, melainkan oleh mereka yang memiliki hubungan keluarga atau afiliasi politik yang tepat. Ini menciptakan sebuah spiral negatif: orang-orang terbaik memilih untuk berkarier di luar negeri atau di sektor swasta multinasional, meninggalkan birokrasi dan institusi publik diisi oleh mereka yang paling pandai bermanuver, bukan yang paling mampu bekerja.

Dampak psikologis dari semua ini pada masyarakat luas sangatlah dalam. Di layar televisi, mereka melihat seorang koruptor yang merugikan negara triliunan rupiah bisa tersenyum dan melambaikan tangan dari mobil mewah setelah mendapatkan vonis ringan. Sementara itu, di slip gaji mereka, muncul potongan baru bernama Tapera untuk sebuah rumah yang terasa seperti mimpi di siang bolong. Kontras yang brutal ini melahirkan

lynk.id/digilera

sebuah mekanisme pertahanan psikologis yang bernama sinisme. Masyarakat menjadi apatis terhadap politik. “Untuk apa memilih, jika pemenangnya selalu mereka?” menjadi dalih yang lumrah. Kepercayaan pada institusi—mulai dari parlemen, pengadilan, hingga pemerintah—terkikis habis.

Pada akhirnya, ketidakpercayaan pada sistem ini merembes turun dan merusak hubungan antarwarga itu sendiri. Semangat “gotong royong” yang dulu menjadi mitos pendiri bangsa kini terasa seperti barang antik. Ia telah digantikan oleh mentalitas “senggol bacok”—sebuah individualisme defensif yang agresif di ruang publik. Kita melihatnya setiap hari: pengendara motor yang berkelahi karena serempetan kecil, orang-orang yang tanpa rasa bersalah menyerobot antrean, dan sampah yang dilempar begitu saja dari jendela mobil. Ini bukan sekadar masalah etika atau sopan santun. Ini adalah gejala dari sebuah masyarakat yang merasa bahwa aturan tidak lagi berlaku sama untuk semua, sehingga cara terbaik untuk bertahan hidup adalah dengan menjadi yang paling egois dan paling kuat.

Inilah keretakan paling dalam pada kaki kaca sang raksasa. Bukan retak ekonomi atau infrastruktur, melainkan retak sosial. Sebuah krisis kepercayaan yang membuat warga negara asing terhadap negaranya sendiri, dan asing terhadap sesamanya.

Sebab, bagaimana sebuah bangsa bisa membangun sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing, seperti yang didengungkan dalam visi Indonesia Emas, jika fondasi paling dasar untuk belajar dan berkembang—yaitu kepercayaan pada aturan main yang adil—telah hancur berkeping-keping?

lynk.id/digitera

Bab 10
Jebakan Keterampilan:
Pendidikan yang Tertinggal dari Laju Mesin

Pertanyaan yang menggantung di akhir bab sebelumnya—bagaimana sebuah bangsa bisa membangun SDM unggul di tengah krisis kepercayaan?—menemukan jawabannya yang muram di sini. Jawabannya adalah: tidak bisa. Setidaknya, tidak dengan "pabrik" yang saat ini bertugas untuk mencetak manusia-manusia tersebut. Jika arsitektur kekuasaan adalah kerangka sistemnya dan krisis kepercayaan adalah penyakit dalam darahnya, maka sistem pendidikan adalah sistem saraf pusatnya yang mengalami malfungsi kronis.

Indonesia saat ini terperangkap dalam apa yang bisa disebut sebagai **Jebakan Keterampilan (*Skill Trap*)**. Ini adalah sebuah kondisi paradoksal di mana dunia usaha dan industri modern berteriak kekurangan talenta yang siap pakai, sementara pada saat yang sama jutaan anak muda terlempar dari sistem pendidikan tanpa bekal yang relevan, menambah panjang barisan pengangguran. Jebakan ini bukanlah sebuah kebetulan, melainkan hasil dari kegagalan desain yang berlapis-lapis.

Lapisan pertama adalah kurikulum pendidikan dasar dan menengah yang masih gagap menghadapi tuntutan abad ke-21. Di saat dunia membutuhkan para pemikir kritis, pemecah masalah yang kreatif, dan individu yang mampu berkolaborasi, sistem pendidikan kita masih terobsesi dengan hafalan dan keseragaman jawaban. Para siswa dibebani dengan puluhan mata pelajaran yang menuntut mereka untuk menelan informasi sebanyak-banyaknya, bukan untuk mengolah dan mempertanyakannya. Mereka dilatih untuk mengikuti instruksi dengan patuh, bukan untuk

lynk.id/digiterra

berinisiatif dan bereksperimen. Sekolah-sekolah kita, secara tidak sadar, masih mencetak calon-calon buruh untuk lantai pabrik abad ke-20, lantai pabrik yang ironisnya kini sudah tidak ada lagi karena telah digantikan oleh robot.

Lapisan kedua adalah fatamorgana program *reskilling* dan *upskilling* yang digadang-gadang pemerintah sebagai solusi bagi mereka yang tergusur oleh otomatisasi. Ingatkah kita pada kisah Suryo di Bab 4, seorang pekerja perakitan veteran yang kehilangan pekerjaannya karena robot? Pengalamannya adalah arketipe dari kegagalan program-program ini. Ketika ia dan ribuan rekannya membutuhkan pelatihan untuk menjadi teknisi mesin CNC atau operator sistem robotik, yang mereka dapatkan adalah "pelatihan membuat kue dan sabun cair".

Masalahnya adalah, program-program ini seringkali dirancang sebagai "proyek" yang bertujuan untuk menyerap anggaran dan memenuhi target jumlah peserta, bukan sebagai solusi strategis yang dirancang bersama industri untuk mengisi lowongan pekerjaan yang nyata. Pelatihan yang diberikan bersifat generik, singkat, dan tidak tersertifikasi dengan baik, meninggalkan para pesertanya dengan selembar sertifikat yang tak banyak berguna di bursa kerja yang kompetitif.

Lapisan ketiga, yang paling ironis, adalah fenomena sarjana menganggur. Di satu sisi, para CEO perusahaan teknologi terus mengeluh di media massa tentang sulitnya mencari talenta digital lokal yang mumpuni. Di sisi lain, ribuan sar-jana ilmu komputer, teknik informatika, dan desain komunikasi visual lulus setiap tahunnya, hanya untuk menyadari bahwa ijazah mereka tidak cukup. Sebagian karena kurikulum universitas yang tertinggal dari perkembangan industri, namun sebagian besar karena masalah yang lebih dalam yang kita bahas di bab sebelumnya: matinya meritokrasi.

lynk.id/digitera

Ketika sebuah perusahaan—baik BUMN maupun swasta—membuka lowongan, seringkali posisi itu sudah "ditandai" untuk keponakan seorang direktur atau titipan dari seorang pejabat. Para sarjana yang berprestasi dengan IPK cumlaude harus bersaing dengan kandidat yang bermodalkan "jalur orang dalam". Ini menciptakan sebuah lingkaran setan demoralisasi: "Untuk apa belajar dan berprestasi jika pada akhirnya yang menentukan adalah koneksi?" Pertanyaan ini menghantui begitu banyak anak muda yang brilian namun tak berdaya.

Maka, Indonesia terjebak dalam sebuah ironi tragis: sebuah bangsa dengan bonus demografi yang melimpah, di mana jumlah usia produktifnya mencapai puncak, namun sebagian besar dari sumber daya manusia itu tidak terasah dengan baik. Ibarat memiliki tambang emas raksasa, namun hanya dibekali dengan cangkul dan sekop yang berkarat untuk menggalinya.

Kegagalan sistemik dalam membangun manusia ini, sama seperti kerusakan lingkungan dan konflik sosial yang telah kita lihat, adalah sebuah "biaya" lain dari pembangunan. Sebuah biaya tak terlihat yang akan kita coba pahami dan hitung di bab selanjutnya.

lynk.id/ongiena

Bab 11
Eksternalitas:
Biaya Siluman yang Dibayar Rakyat

Setelah menelusuri penderitaan di lantai pabrik, konflik di atas tanah, kerusakan alam, arsitektur kekuasaan yang culas, hingga erosi kepercayaan dan kegagalan sistemik dalam pendidikan, kita tiba pada satu pertanyaan pamungkas: Bagaimana semua ini bisa terus berjalan? Bagaimana sebuah model pembangunan yang begitu merusak bisa terus dipuja dan dilanjutkan seolah tanpa cela? Jawabannya terletak pada sebuah konsep ekonomi yang jarang dibicarakan di luar ruang kuliah, namun praktiknya kita rasakan setiap hari. Konsep itu adalah **eksternalitas**.

Eksternalitas, dalam bahasa sederhana, adalah biaya dari sebuah kegiatan ekonomi yang tidak ditanggung oleh produsen atau konsumennya, melainkan 'dilempar' ke pihak ketiga yang tak berdaya—yaitu masyarakat luas, lingkungan, dan generasi masa depan—yang seringkali tidak ikut menikmati keuntungannya. Ia adalah biaya siluman. Ia adalah nota tagihan yang sengaja tidak dimasukkan ke dalam kasir.

Pernahkah Anda bertanya mengapa harga sehelai kaus dari pusat perbelanjaan bisa begitu murah? Harga di labelnya mungkin hanya seratus ribu rupiah. Namun, itu karena label harganya telah disobek. Jika kita menempelkan kembali sobekan-sobekan itu, harganya akan menjadi berbeda. Ada sobekan label bertuliskan 'Upah Layak Buruh' yang tidak dibayarkan. Ada sobekan label bertuliskan 'Biaya Pemulihan Sungai Citarum' yang diracuni oleh limbah pewarna tekstilnya—biaya ini tidak ditanggung oleh pabrik, melainkan oleh pemerintah (dari pajak kita) dan oleh para petani yang gagal panen. Ada pula sobekan label 'Biaya Kesehatan

Warga' yang menderita penyakit kulit akibat air yang tercemar. Harga kaus itu murah karena biaya sejatinya telah dieksternalisasi, dibebankan kepada orang lain.

Contoh yang sama berlaku untuk baterai di ponsel pintar kita, yang harganya bisa terjangkau karena nikel dari Sulawesi diekstraksi dengan murah. Murah, karena harga nikel itu tidak pernah memasukkan biaya pemulihan terumbu karang yang hancur akibat limbahnya, atau biaya hilangnya mata pencaharian nelayan seperti Pak Hasan. Harga murah itu adalah sebuah ilusi yang dibayar dengan kerusakan ekologis yang tak ternilai.

Lebih jauh lagi, konsep eksternalitas ini bisa kita perluas untuk memahami biaya dari korupsi dan krisis kepercayaan yang kita bahas sebelumnya. Korupsi dalam sebuah proyek infrastruktur bukan hanya soal kerugian negara. Ia adalah eksternalitas negatif dalam bentuk 'Pajak Korupsi' yang dibayar rakyat. Ketika anggaran jalan tol dikorupsi, kualitas aspalnya menurun. Rakyat membayarnya melalui kerusakan kendaraan yang lebih cepat, angka kecelakaan yang lebih tinggi, dan biaya perbaikan jalan yang harus dianggarkan lagi di tahun berikutnya.

Demikian pula dengan krisis kepercayaan. Ia menciptakan 'Pajak Ketidakpercayaan'. Ketika sistem berjalan karena koneksi bukan kompetensi, kita semua membayar pajaknya dalam bentuk layanan publik yang buruk, birokrasi yang lamban, dan inovasi yang mandek. Ketika masyarakat menjadi apatis dan individualistis, kita membayar pajaknya dalam bentuk lingkungan sosial yang tidak aman dan hilangnya modal sosial untuk menyelesaikan masalah bersama. Biaya-biaya ini masif, namun tak pernah ada dalam laporan keuangan manapun.

Puncak dari semua ilusi ini terletak pada cara kita mengukur keberhasilan: Produk Domestik Bruto (PDB). Ironisnya, PDB seringkali justru menghitung eksternalitas negatif sebagai sebuah hal yang positif.

lynk.id/digilerra

Tumpahan minyak di laut akan menaikkan PDB karena ada uang yang dihabiskan untuk operasi pembersihan. Tingkat polusi udara yang tinggi akan menaikkan PDB karena penjualan obat batuk dan alat pemurni udara meningkat. Tingginya angka kriminalitas akan menaikkan PDB karena ada lebih banyak uang yang dibelanjakan untuk membangun penjara dan menyewa satpam. Simon Kuznets, ekonom yang menciptakan konsep PDB, bahkan telah memperingatkan dunia sejak awal: jangan pernah menggunakan PDB sebagai ukuran kesejahteraan. Namun, kita tetap melakukannya.

Maka terungkaplah rahasia terbesar sang Raksasa. Ia bisa melangkah dengan begitu cepat dan tampak begitu perkasa karena ia tidak pernah benar-benar membayar ongkos perjalanannya. Ia berlari di atas sebuah *treadmill* akuntansi kreatif yang menyembunyikan semua biaya sejatinya, dan menyebut kecepatan larinya sebagai pertumbuhan.

Setelah membongkar desain mesin yang rusak ini dan memahami cara kerjanya yang merusak, satu pertanyaan besar tersisa: Bisakah kita membangun mesin yang baru? Pertanyaan inilah yang akan kita coba jawab di bagian terakhir buku ini.

lynk.id/digtera

BAGIAN IV:
MEMBANGUN KEMBALI SANG RAKSASA

Setelah melakukan perjalanan panjang menyusuri retak-retak yang menggores fondasi bangsa, mudah untuk jatuh dalam keputusasaan. Gambaran yang tersaji di bagian-bagian sebelumnya memang suram. Namun, tujuan dari diagnosis bukanlah untuk meratapi penyakit, melainkan untuk menemukan jalan menuju kesembuhan. Harapan bukanlah komoditas pasif yang ditunggu, melainkan sebuah pilihan aktif yang diperjuangkan.

Bagian terakhir ini bukanlah sebuah kumpulan fantasi utopis. Ia adalah upaya untuk menyajikan sebuah peta jalan, sebuah cetak biru alternatif yang mungkin dan bisa diperjuangkan. Jika mesin pembangunan yang ada saat ini terbukti rusak dan merusak, maka kita tidak punya pilihan lain selain mulai merancang dan membangun mesin yang baru. Bagian ini adalah tentang cetak biru untuk mesin tersebut, yang dibangun bukan lagi di atas kaki kaca, melainkan di atas fondasi keadilan, kepercayaan, dan keberlanjutan.

lynk.id/digiterra

Bab 12
Kontrak Sosial Baru:
Membangun di Atas Fondasi Kepercayaan

Langkah pertama untuk memperbaiki ekonomi Indonesia bukanlah kebijakan ekonomi. Pernyataan ini mungkin terdengar kontradiktif, tetapi di sinilah letak kunci dari semua kegagalan yang telah kita urai. Kita tidak bisa membangun sebuah gedung pencakar langit yang kokoh di atas tanah rawa yang labil. Demikian pula, kita tidak bisa membangun ekonomi yang adil dan berkelanjutan di atas fondasi kepercayaan publik yang telah hancur. Maka, langkah pertamanya adalah sebuah langkah moral dan institusional: restorasi total terhadap kepercayaan.

Tanpa kepercayaan, setiap program pembangunan, betapapun mulianya, akan selalu dicurigai sebagai proyek bancakan baru. Tanpa kepercayaan, warga negara tidak akan bersedia berpartisipasi dan berkorban untuk tujuan bersama. Oleh karena itu, sebelum berbicara tentang model ekonomi alternatif, kita harus terlebih dahulu membongkar dan membangun ulang pilar-pilar fundamental yang menopang sebuah kontrak sosial yang sehat antara negara dan warganya.

Pilar pertama dan paling mendesak adalah **pemberantasan korupsi sebagai prasyarat utama, bukan lagi sebagai komoditas politik.** Ini menuntut lebih dari sekadar retorika. Ia menuntut tindakan konkret yang radikal. Langkah pertama adalah mengembalikan independensi dan kekuatan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ke desain awalnya sebelum direvisi, memberikannya kembali taring untuk mengejar para pemain di "liga korupsi" tanpa pandang bulu. Langkah kedua adalah segera mengesahkan Undang-Undang Perampasan Aset, sebuah senjata ampuh

lynk.id/digilora

untuk memiskinkan para koruptor dan memulihkan kerugian negara, menciptakan efek jera yang sesungguhnya. Dan langkah ketiga adalah memulai reformasi total di dalam lembaga peradilan untuk memutus mata rantai mafia peradilan yang selama ini membuat hukum terasa tumpul ke atas dan tajam ke bawah.

Pilar kedua adalah **transparansi radikal yang dimungkinkan oleh teknologi.** Kepercayaan tidak bisa tumbuh dalam kegelapan. Untuk itu, pemerintah harus berani membuka semua jendela dan pintu agar bisa diawasi langsung oleh pemilik sah negara ini: rakyat. Bayangkan sebuah platform digital tunggal yang dikelola negara, di mana setiap rupiah anggaran—mulai dari tingkat kementerian di Jakarta hingga ke tingkat kelurahan di pelosok—dapat dilacak penggunaannya oleh publik secara *real-time*. Bayangkan semua izin konsesi tambang, perkebunan, dan hak pengusahaan hutan ditampilkan di platform yang sama, lengkap dengan data siapa pemilik manfaat sesungguhnya (*beneficial owner*) di balik nama-nama perusahaan cangkang. Korupsi menjadi jauh lebih sulit ketika semua transaksi dilakukan di bawah tatapan jutaan pasang mata. Sinar matahari adalah disinfektan terbaik.

Baru setelah kedua pilar ini mulai ditegakkan, kita bisa berbicara tentang pilar ketiga, yaitu **merumuskan ulang tujuan pembangunan itu sendiri.** Di sinilah kita secara sadar meninggalkan obsesi buta terhadap angka pertumbuhan PDB. Kita beralih menuju sebuah paradigma baru: **Ekonomi Kesejahteraan (*Well-being Economy*)**. Salah satu kerangka terbaik untuk membayangkannya adalah model *Doughnut Economics* yang digagas oleh ekonom Kate Raworth.

Bayangkan sebuah donat. Lubang di tengahnya adalah kondisi di mana manusia kekurangan hal-hal esensial untuk hidup layak (pangan, air bersih, hunian, pendidikan, kesehatan, kesetaraan gender). Ini adalah **fondasi sosial** yang tidak boleh ada seorang pun warganya jatuh ke dalamnya. Sementara itu, kerak luar donat adalah batas-batas ekologis planet kita yang

lynk.id/digilera

tidak boleh kita lampaui (perubahan iklim, hilangnya keanekaragaman hayati, polusi kimia). Ini adalah **langit-langit ekologis**. Tugas umat manusia di abad ke-21, termasuk Indonesia, adalah untuk menciptakan sebuah ekonomi yang bisa memenuhi semua kebutuhan di fondasi sosial, tanpa melampaui langit-langit ekologis. Hidup di dalam "daging" donat yang aman dan adil tersebut.

Ini bukanlah jalan yang mudah. Ia adalah sebuah pendakian terjal yang menuntut perombakan total cara kita berpikir dan bertindak. Namun, untuk pertama kalinya, puncaknya bukanlah ilusi PDB yang semu, melainkan sebuah dataran tinggi di mana kemakmuran manusia dan kelestarian alam bisa bersemayam bersama. Pendakian inilah yang harus kita mulai.

lynk.id/digiterra

Bab 13
Demokrasi Substantif:
Dari Partisipasi Semu ke Kedaulatan Rakyat

Selama ini, kata ‘demokrasi’ di Indonesia seringkali disempitkan maknanya menjadi satu ritual lima tahunan: pemilihan umum. Ia adalah sebuah pesta pora politik yang penuh dengan spanduk, janji-janji, dan jari yang dicelup tinta ungu sebagai bukti partisipasi. Setelah ritual itu selesai, kedaulatan seolah kembali diserahkan sepenuhnya kepada para elite yang terpilih, dan rakyat kembali menjadi penonton. Ini adalah **demokrasi prosedural**—semua prosedur formalnya telah dijalankan, namun substansinya seringkali kosong.

Kontrak sosial baru yang kita bahas di bab sebelumnya tidak akan pernah terwujud di dalam sistem seperti ini. Ia membutuhkan sebuah evolusi: dari demokrasi prosedural menuju **demokrasi substantif**. Sebuah demokrasi di mana kedaulatan rakyat nyata dan dirasakan setiap hari, bukan hanya di bilik suara. Ia adalah tentang mekanisme yang memungkinkan warga negara secara aktif membentuk, mengawasi, dan mengoreksi arah kebijakan negaranya secara terus-menerus.

Pilar pertama untuk mewujudkan ini adalah dengan mengakui dan memperkuat **masyarakat sipil sebagai pilar keempat demokrasi,** setara dengan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Masyarakat sipil—yang terdiri dari organisasi non-pemerintah (LSM), serikat buruh, perhimpunan petani, komunitas adat, organisasi mahasiswa, hingga media-media independen—bukanlah musuh negara. Mereka adalah mitra kritis. Merekalah "anjing penjaga" (*watchdog*) yang menggonggong ketika kekuasaan menyimpang, laboratorium ide yang menawarkan solusi-solusi

lynk.id/digicerta

alternatif, sekaligus organisator yang menerjemahkan kegelisahan-kegelisahan individual menjadi sebuah agenda kolektif yang kuat. Negara yang sehat tidak membungkam mereka, tetapi justru melindungi ruang gerak mereka dan mendengarkan suara mereka dengan saksama.

Namun, mendengarkan saja tidak cukup. Pilar kedua adalah memberikan **perlindungan hukum yang kokoh bagi para pembawa pesan.** Sebuah demokrasi tidak bisa disebut sehat jika para pembawa pesan kebenaran—para aktivis, jurnalis investigatif, dan warga biasa yang berani bersuara—justru hidup dalam ketakutan akan kriminalisasi. Untuk itu, langkah mendesak yang harus dilakukan adalah merevisi total atau mencabut pasal-pasal karet dalam Undang-Undang ITE yang selama ini menjadi senjata favorit untuk membungkam kritik. Lebih dari itu, perlu diciptakan sebuah kerangka hukum anti-SLAPP (*Strategic Lawsuit Against Public Participation*), yaitu gugatan hukum 'abal-abal' dari korporasi atau pejabat yang tujuannya bukan untuk mencari keadilan, melainkan untuk membangkrutkan dan menguras energi para aktivis pembela lingkungan dan hak asasi manusia. Kebebasan berpendapat harus berarti kebebasan setelah berpendapat.

Pilar ketiga, yang merupakan mekanisme praktisnya, adalah mengubah model partisipasi publik **dari konsultasi semu menjadi ko-kreasi kebijakan.** Selama ini, "uji publik" atau "konsultasi publik" seringkali hanya menjadi stempel formalitas di akhir proses, ketika sebuah draf undang-undang atau peraturan sebenarnya sudah final. Model baru yang harus dibangun adalah model ko-kreasi (penciptaan bersama). Artinya, kelompok masyarakat yang akan terdampak langsung oleh sebuah kebijakan harus dilibatkan secara bermakna **sejak hari pertama** proses perumusan.

Bayangkan sebuah proses di mana ketika merancang sebuah bendungan, yang diundang ke meja perundingan bukan hanya insinyur,

lynk.id/digdera

konsultan asing, dan investor, tetapi juga perwakilan masyarakat adat yang tanahnya akan ditenggelamkan, para ahli ekologi independen, dan serikat petani yang sawahnya bergantung pada aliran sungai tersebut. Pengetahuan dan pengalaman hidup mereka dianggap sebagai data yang sama validnya dengan data teknis dan proyeksi keuntungan. Kebijakan yang dihasilkan mungkin akan memakan waktu lebih lama untuk dirumuskan, tetapi ia akan jauh lebih adil, komprehensif, dan memiliki legitimasi yang kuat di mata publik.

Demokrasi yang hidup memang tidak 'efisien' seperti komando dari atas ke bawah. Ia berisik, terkadang lambat, dan penuh perdebatan sengit. Namun, ia adalah satu-satunya sistem yang memiliki mekanisme koreksi diri dan mampu menghasilkan kebijakan yang benar-benar merefleksikan kehendak warganya.

Karena kebijakan yang lahir dari rahim permusyawaratan sejati inilah yang akan memiliki kekuatan untuk dijalankan bersama, termasuk kebijakan-kebijakan sulit yang diperlukan untuk melakukan transisi menuju ekonomi yang lebih adil dan hijau, yang akan kita bahas di bab selanjutnya.

lynk.id/digiterra

Bab 14
Transisi yang Berkeadilan: Ekonomi Hijau yang Tidak Meninggalkan Siapapun

Salah satu argumen paling ampuh yang digunakan untuk melanggengkan model pembangunan yang merusak adalah dengan membenturkan isu lingkungan dengan isu perut. Sebuah dikotomi palsu yang memaksa kita untuk memilih: selamatkan hutan atau sediakan lapangan kerja? Tutup PLTU batu bara atau bayar cicilan motor? Narasi ini secara efektif melumpuhkan gerakan pro-lingkungan, melabelinya sebagai agenda elite kota yang tidak peduli dengan nasib orang kecil.

Bab ini akan membongkar kebohongan tersebut. Jawaban atas dilema itu bukanlah "pilih salah satu", melainkan "pilih keduanya". Jalan ke depan tidak menuntut kita untuk mengorbankan kesejahteraan demi ekologi, atau sebaliknya. Ia menuntut sebuah **Transisi yang Berkeadilan (*A Just Transition*)**—sebuah pergeseran total menuju ekonomi hijau yang secara sadar dan terencana menempatkan perlindungan bagi para pekerja dan komunitas yang paling rentan sebagai prioritas utamanya. Ini bukan hanya tentang mengubah sumber energi, tetapi juga tentang mengubah cara kita mendistribusikan kemakmuran dan kesempatan.

Langkah kebijakan pertama yang paling mendasar adalah menerapkan prinsip **"pencemar membayar" (*polluter pays*)** secara tegas melalui instrumen **pajak karbon yang progresif.** Tujuannya sederhana: membuat biaya untuk merusak lingkungan menjadi lebih mahal daripada biaya untuk berinovasi. Setiap ton emisi karbon yang dikeluarkan oleh industri besar—pabrik semen, pembangkit listrik batu bara, industri otomotif—akan dikenakan pajak. Namun, untuk memastikan kebijakan ini

lynk.id/digitorra

tidak membebani rakyat kecil melalui kenaikan harga listrik atau BBM, penerimaan dari pajak karbon ini tidak boleh masuk ke kas negara secara umum. Ia harus dialokasikan ke dalam sebuah "Dana Abadi Keadilan Iklim" yang transparan, yang hasilnya digunakan secara spesifik untuk tiga hal: (1) memberikan subsidi transportasi publik yang massal dan terjangkau, (2) menyalurkan bantuan langsung tunai bertarget kepada keluarga berpenghasilan rendah untuk meringankan beban biaya energi, dan (3) mendanai program jaminan pekerjaan hijau.

Di sinilah jantung dari transisi yang berkeadilan itu berada: **Jaminan Pekerjaan Hijau (*Green Jobs Guarantee*)**. Ini adalah sebuah komitmen dari negara bahwa tidak boleh ada seorang pun pekerja, misalnya penambang batu bara di Kalimantan atau buruh di pabrik yang polutif, yang akan ditinggalkan. Pemerintah secara proaktif menciptakan dan mendanai lapangan kerja baru di sektor-sektor hijau. Pekerjaan-pekerjaan ini bukanlah pekerjaan imajiner. Mereka nyata dan sangat dibutuhkan: menjadi bagian dari tim reforestasi massal yang menanami kembali hutan-hutan gundul, menjadi teknisi yang memasang dan merawat jutaan panel surya di atap-atap rumah, menjadi pekerja terampil di fasilitas daur ulang modern, atau menjadi pemandu ekowisata yang terlatih untuk menjaga kelestarian alam. Ini adalah transformasi kerja, dari yang merusak menjadi yang memulihkan.

Model energi juga harus dirombak total, dari yang sentralistik menjadi yang demokratis. Selama ini, energi dikuasai oleh segelintir perusahaan raksasa, baik BUMN maupun swasta. Masa depan adalah **kedaulatan energi terbarukan berbasis komunitas.** Bayangkan setiap atap rumah di sebuah desa dipasangi panel surya, membentuk sebuah jaringan listrik mandiri yang dikelola oleh koperasi desa. Bayangkan sebuah komunitas di dekat sungai memanfaatkan aliran air untuk pembangkit listrik tenaga mikrohidro yang keuntungannya kembali ke kas desa untuk membiayai sekolah dan puskesmas. Ini tidak hanya menyediakan energi bersih, tetapi

lynk.id/digilena

juga menciptakan kemandirian ekonomi dan memperkuat kohesi sosial di tingkat akar rumput.

Terakhir, paradigma industri itu sendiri harus diubah dari **ekonomi linear (ambil-pakai-buang)** menjadi **ekonomi sirkular.** Ini berarti memprioritaskan desain produk yang awet, mudah diperbaiki, dan mudah didaur ulang. Ini berarti membangun industri reparasi dan rekondisi yang kuat, menciptakan lapangan kerja bagi para teknisi terampil. Ini berarti menganggap sampah bukan sebagai masalah, tetapi sebagai sumber daya yang berharga. Pergeseran ini secara drastis akan mengurangi kebutuhan untuk terus-menerus mengeruk sumber daya alam baru dan menekan volume sampah yang mencemari lingkungan.

Membangun ekonomi hijau yang berkeadilan bukanlah sebuah pengorbanan, melainkan sebuah investasi pada satu-satunya rumah yang kita miliki dan pada satu-satunya masa depan yang layak untuk diwariskan. Ini adalah cara kita memperkuat kaki kaca sang raksasa, mengubahnya menjadi fondasi yang hidup, kokoh, dan berkelanjutan. Namun, semua peta jalan ini, semua cetak biru yang visioner ini, tidak akan berarti tanpa satu elemen terakhir yang tak bisa ditulis dalam peraturan manapun: kehendak untuk bertindak.

lynk.id/digitera

Epilog
Optimisme Bertindak, Bukan Optimisme Menunggu

Kita telah sampai di akhir perjalanan. Sebuah perjalanan panjang yang membawa kita dari ruang rapat yang berkilauan di Jakarta, ke lantai pabrik yang senyap, menyusuri sungai yang tercemar, hingga membongkar arsitektur kekuasaan yang tak terlihat. Ini adalah sebuah perjalanan yang seringkali terasa suram dan menyesakkan, sebuah potret yang bisa dengan mudah menuntun kita pada jurang sinisme dan keputusasaan.

Namun, tujuan dari diagnosis bukanlah untuk meratapi penyakit, melainkan untuk menemukan jalan menuju kesembuhan. Peta jalan yang dipaparkan di Bagian IV mungkin terasa idealistis, sebuah pendakian yang teramat terjal. Dan memang demikian. Tidak ada tongkat sihir yang bisa memperbaiki semua keretakan ini dalam semalam. Lalu, di manakah letak harapan?

Beberapa minggu lalu, pada sebuah sore yang mendung di bulan Juni 2025 ini, saya kembali mengunjungi warung kopi di bawah jembatan tol itu, tempat pertama kali saya bertemu Ahmad. Ia ada di sana, bersama beberapa teman yang sama. Namun, ada sesuatu yang berbeda. Tumpukan kertas fotokopian dan sebuah laptop tua terbuka di atas meja mereka. Mereka bukan lagi sekumpulan orang yang hanya mengeluh pasrah.

Ahmad bercerita bahwa ia dan kawan-kawannya, dengan bantuan seorang mahasiswa hukum, membentuk sebuah posko pengaduan kecil-kecilan. Mereka mengumpulkan data rekan-rekan mereka dari berbagai pabrik yang di-PHK, lalu membantu mereka menghitung hak pesangon sesuai aturan dan cara mengajukan keluhan jika ada

lynk.id/digiterra

penyelewengan. Sebuah pekerjaan kecil, rumit, dan seringkali tidak membuahkan hasil.

Saya bertanya kepadanya, di tengah semua ini, apakah ia masih punya optimisme.

Ia terdiam sejenak, menatap lalu lalang kendaraan di jalanan berdebu di depan kami. Lalu ia menjawab, "Optimis? Entahlah, Mas. Kalau menunggu pemerintah atau perusahaan berbaik hati, saya tidak optimis. Sampai kapan pun tidak akan."

Ia menyeruput kopinya sebelum melanjutkan, "Tapi kalau ditanya apa kami bisa mengubah sesuatu... sedikit-sedikit... kami optimis. Karena kami tidak lagi menunggu. Kami bertindak."

Jawaban Ahmad adalah intisari dari buku ini. Harapan untuk Indonesia tidak terletak pada optimisme pasif yang menunggu datangnya pemimpin Ratu Adil atau keajaiban ekonomi. Harapan terletak pada **optimisme bertindak**.

Sang Raksasa di Kaki Kaca itu bukanlah monster di negeri antah berantah yang harus kita taklukkan. Raksasa itu adalah kita, bangsa Indonesia. Sebuah entitas yang penuh dengan kekuatan, potensi, dan cita-cita luhur, namun sekaligus rapuh oleh penyakit korupsi, ketidakadilan, dan krisis kepercayaan yang menggerogoti fondasinya.

Kaki-kaki kacanya tidak akan menjadi baja dengan sendirinya. Ia akan diperkuat oleh setiap tindakan kecil yang kita ambil. Setiap kali seorang warga seperti Ahmad memutuskan untuk berhenti mengeluh dan mulai mengorganisir, sebuah retakan kecil tertutup. Setiap kali seorang jurnalis berani menerbitkan sebuah laporan investigasi yang berisiko, fondasi itu menjadi sedikit lebih kokoh. Setiap kali seorang mahasiswa turun ke jalan untuk memprotes kebijakan yang tidak adil, setiap kali seorang guru menolak untuk sekadar mengajar hafalan dan mulai mendidik pemikiran

lynk.id/digiterra

kritis, setiap kali kita memilih untuk tidak memberi uang damai kepada polisi atau berhenti menyerobot antrean, kita sedang menyuntikkan semen ke dalam retakan-retakan itu.

Buku ini akan segera Anda tutup. Perjalanan kita di atas kertas akan berakhir.

Tetapi perjalanan sesungguhnya di dunia nyata justru baru akan Anda mulai. Setelah melihat peta masalah dan kemungkinan peta jalan solusinya, satu pertanyaan terakhir tersisa, bukan lagi untuk saya, tetapi untuk Anda.

Peran apa yang akan Anda ambil dalam kisah besar bangsa ini?

Masa depan tidak ditulis. Ia diperjuangkan.

Mari berjuang.

lynk.id/digiterra